Volume 5 Nomor 2 Desember 2023: 28-37

PERAN STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN WISATA ALAM KAPOPO TAMAN HUTAN RAYA SULAWESI TENGAH

(The Role of Stakeholders in Natural Tourism Management of Kapopo Forest Park, Central Sulawesi)

Arman Maiwa[1], Abdul Rahman[1], Hendra Pribadi[1], Hamka[1], Rhamdhani Fitrah Baharuddin[1], Gerry Jardan[2,] Amati Eltriman Hulu[3], Mochamad Fadil[3]
[1]Program Studi Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako
[2]Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana universitas Andalas
[3]Lembaga Riset Mahasiswa Kehutanan Universitas Tadulako,
Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Tondo Palu Sulawesi Tengah 94118
e-mail: armanmaiwa88@gmail.com

ABSTRACT

The main challenge in managing Kapopo natural tourism is the participation of stakeholders who have an interest in its management. The importance of understanding and involvement of stakeholders in the management of Kapopo natural tourism can be seen from the achievement of sustainability in Kapopo natural tourism, which cannot be achieved optimally without effective cooperation between all parties involved. So instruments are needed to involve every stakeholder as the key to the success of Kapopo natural tourism. This research examines the role of stakeholders who have an interest and influence in supporting the successful management of Kapopo Nature Tourism in Central Sulawesi. The method uses qualitative descriptive analysis to see the role of stakeholders, as well as influence and interest analysis to see the influence and interests of each stakeholder in managing Kapopo natural tourism. The results of this research identified 13 stakeholders who have various roles, of which the Forestry Service and the Grand Forest Park Manager are key stakeholders in the management of Kapopo natural tourism. In this research, it was also found that in general the relationship between stakeholders was good, but there were several stakeholders who had different views which had the potential for conflict and could influence the management of Kapopo natural tourism.

Keywords : Grand Forest Park, Nature Tourism, Stakeholder.

ABSTRAK

Tantangan utama pengelolaan Wisata Alam Kapopo adalah partisipasi *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam pengelolaannya. Pentingnya pemahaman dan keterlibatan *stakeholder* dalam pengelolaan Wisata Alam Kapopo dapat dilihat dari pencapaian keberlanjutan Wisata Alam Kapopo, tidak dapat dicapai secara optimal tanpa kerjasama yang efektif antara semua pihak yang terlibat. Sehingga dibutuhkan instrumen untuk melibatkan setiap *stakeholder* sebagai kunci keberhasilan Wisata Alam Kapopo. Penelitian ini mengkaji peran stakehoders yang mempunyai kepentingan dan pengaruh dalam mendukung keberhasilan pengelolaan Wisata Alam Kapopo di Sulawesi Tengah. Metode menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk melihat peran s*takeholder* , serta analisis pengaruh dan kepentingan untuk melihat pengaruh dan kepentingan setiap *stakeholder* dalam pengelolaan Wisata Alam Kapopo. Hasil penelitian ini teridentifikasi 13 *stakeholder* memiliki peran beragam, yang mana Dinas kehutanan dan Pengelola Taman Hutan Raya menjadi *stakeholder* kunci pada pengelolaan Wisata Alam

Volume 5 Nomor 2 Desember 2023: 28-37

Kapopo. Pada penelitian ini juga ditemukan secara umum hubungan antara s*takeholder* baik namun terdapat beberapa s*takeholder* memiliki perbedaan pandangan yang berpotensi konflik dan dapat mempengaruhi pengelolaan Wisata Alam Kapopo.

Kata kunci : *Stakeholder,* Taman Hutan raya, Wisata Alam.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi pariwisata yang sangat banyak karena memiliki kekayaan alam dari segi daratan maupun lautan yang sangat melimpah dan beragam (Rahma, 2020 ; Lebu *et al.* 2020). Hal ini menjadi daya tarik para wisatawan baik luar negeri maupun dalam negeri untuk berwisata atau melakukan kegiatan berkunjung ke tempat wisata dengan tujuan yang beragam, di antaranya menghabiskan waktu liburan, menikmati suasana alam, atau ingin mengetahui daya tarik yang dimiliki oleh tempat wisata yang dikunjungi (Primadany *et al*., 2013).

Data Kementerian Pariwisata tahun 2022 menunjukkan sektor pariwisata berkontribusi 3,6% terhadap PDB nasional, dan menyumbang devisa sebesar 6,72 milliar dollar AS. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan pengembangan wisata alam sebagai salah satu skema pemanfaatan hutan diharapkan dapat berkontribusi pada penerimaan negara bukan pajak dan menjadi salah upaya menjaga ketahanan ekonomi negara dari sektor kehutanan (Intyaswono *et al*., 2016).

Sejalan dengan pernyataan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai pemanfaatan jasa lingkungan sebagai tempat wisata, maka salah satu skema atau program yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu Taman Hutan Raya (TAHURA). Pada dasarnya Taman Hutan Raya merupakan kawasan hutan yang dapat berfungsi sebagai kawasan wisata yang berbasis lingkungan. Adapun tujuan dari Taman Hutan Raya ini sebagai kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi (Flamin *et al.*, 2013).

Salah satu bentuk pengembangan objek wisata alam yang ada di TAHURA Sulawesi Tengah adalah Wisata Alam Kapopo yang berada di dalam kawasan Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah tepatnya di Desa Ngatabaru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Hasil penelitian Talantan *et al.,* (2022), menyatakan bahwa salah satu kelemahan dalam pengelolaan Wisata Alam Kapopo adalah kurangnya dukungan dan peran dari pemangku kepentingan dalam pengelolaan Wisata Alam Kapopo. Penelitian Maysarah *et al*., (2017), mengungkapkan dalam pengembangan pengelolaan Wisata Alam Kapopo memerlukan dukungan segmentasi dari pemangku kepentingan lainnya termasuk pemerintah dan masyarakat setempat. Sehingga dalam pengembangan Wisata Alam Kapopo, dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak yang terlibat. Para pihak yang dimaksud ini sering disebut juga sebagai *stakeholder* (Kadir *et al*., 2013).

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu dilakukan identifikasi s*takeholder* dan melakukan analisis untuk melihat bagaimana pengaruhnya dan apa kepentingannya terhadap pengelolaan Wisata Alam Kapopo. Dan hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam pengelolaan Wisata Alam Kapopo di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilaksanakan di Wisata Alam Kapopo, Taman Hutan Raya (TAHURA) Sulawesi Tengah pada bulan Maret sampai dengan bulan Agustus 2023.

Penentuan responden dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden secara sengaja sebagai sumber data, dengan kriteria responden tersebut adalah orang-orang yang di anggap tahu tentang pengelolaan Wisata Alam Kapopo. Selain itu juga, penentuan responden ini didukung dengan teknik *snowball sampling*, yaitu teknik yang digunakan apabila responden utama belum memberikan data yang lengkap maka peneliti akan mencari informasi dari informan lain. Wawancara awal dilakukan pada *Stakeholder* kunci, antara lain; UPT Tahura, Dinas Kehutanan Provinsi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, kelompok tani hutan, dan pemerintah desa Ngatabaru.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh melalui pengamatan langsung dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder dihasilkan melalui studi literatur. data yang diperoleh dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif dengan mengidentifikasi dan mempelajari s*takeholder* untuk memahami peran yang dimainkan oleh s*takeholder* dalam pengelolaan wisata alam Kapopo.

Analisis tingkat pengaruh dan kepentingan dalam pengelolaan wisata Kapopo dilakukan dengan melihat kepentingan dan pengaruh *stakeholder* dan digambarkan dalam diagram matriks pengaruh dan kepentingan. Menurut Reed *et al*., (2009), dalam analisis pemangku kepentingan dibagi menjadi 4 kelompok s*takeholder*, antara lain: kelompok *Key Player*, kelompok *Context Setter*, kelompok *Subjeck*, dan kelompok *Crowd*. Yaitu; 1). Kelompok *Key player* merupakan kelompok kunci atau aktor yang mempunyai kepentingan dan pengaruh yang tinggi. 2). Kelompok s*ubjeck* merupakan kelompok yang mempunyai kepentingan yang tinggi namun berpengaruh rendah. 3). *Context setter* adalah *stakeholder* mempunyai kepentingan yang rendah dan pengaruh yang rendah. 4). *Crowd* adalah *stakeholder* yang mempunyai pengaruh dan kepentingan yang rendah.

Menurut Reed *et al*., (2009), untuk menentukan hasil analisis pengaruh dan kepentingan dilakukan dengan cara melakukan skoring berdasarkan 5 variabel pengaruh dan 5 variabel kepentingan. 5 variabel pengaruh tersebut antara lain kekuatan *stakeholder*, kelayakan s*takeholder*, kompensasi s*takeholder*, kepribadian s*takeholder* dan kekuatan organisasi *stakeholder*. Sementara untuk mengukur kepentingan s*takeholder* di ukur dengan 5 variabel berikut; keterlibatan s*takeholder*, manfaat yang diperoleh s*takeholder*, kewenangan *stakeholder*, program kerja *stakeholder* dan ketergantungan *stakeholder* terhadap Wisata Alam Kapopo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi *Stakeholder*

Hasil identifikasi *stakeholder* menunjukkan bahwa *Stakeholder* berasal dari unsur instansi pemerintahan (*goverment*), perguruan tinggi (*academy*) dan masyarakat (*community*). Jumlah *Stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan Wisata Alam Kapopo yakni 13 *Stakeholder* (Tabel 1).

Stakeholder dari unsur pemerintahan (*goverment*) terdiri atas pengelola Taman Hutan Raya, Pemerintah Provisi Sulawesi Tengah, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, Dinas PUPR Sulawesi Tengah, Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Tengah, Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah, Balai Konservasi sumberdaya Alam dan Pemerintah Desa Ngatabaru.

Stakeholder dari unsur perguruan tinggi (*academy*) berasal dari seluruh perguruan tinggi yang berada di wilayah Provinsi

Sulawesi Tengah salah satunya yaitu Universitas Tadulako. Perguruan Tinggi memiliki peran dalam melakukan penelitian dan pengabdian pada kawasan Wisata Alam Kapopo.

Stakeholder dari unsur masyarakat (*community*) terdiri dari LSM Ngata Anata Makumpu (NGATAKU), Kelompok Tani Hutan Ngatabaru dan Kelompok Tani Hutan Kawatuna. Masyarakat setempat maupun kelompok masyarakat memiliki dampak besar pada lingkungan dan budaya di sekitar destinasi wisata alam, keberadaan masyarakat menjadi mitra penting dalam upaya pelestarian dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam konteks pengelolaan wisata alam, pemerintah daerah memegang peran penting dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang mengatur penggunaan dan pelestarian sumber daya alam. Mereka bertanggung jawab atas perizinan operasi wisata dan penanganan dampak lingkungan (Simamora *et al*., 2016). Di sisi lain, masyarakat setempat memiliki peran dalam menjaga keberlanjutan lingkungan alam dan budaya daerah mereka. Mereka dapat membantu dalam pemantauan dan pelestarian lingkungan serta menyediakan layanan kepada pengunjung. Selain itu, perguruan tinggi memegang peran dalam penelitian dan pendidikan terkait wisata alam. Mereka dapat memberikan pengetahuan dan sumber daya intelektual yang mendukung pengelolaan wisata alam yang berkelanjutan dikawasan koservasi (Maiwa *et al*, 2018).

Tabel 1. Hasil Identifikasi *Stakeholder*

No	*Stakeholder*	Peran	Pola Hubungan
1	Pengelola Taman Hutan Raya	Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan Wisata Alam Kapopo	Seluruh Stakholer yang mempunyai pengaruh dan kepentingan
2	Pemerintah Provisi Sulawesi Tengah	Memberikan dukungan anggaran dan kebijkan dalam pengelolaan Tahura	Dinas Kehutanan, Pengelola Tahura, Dinas PUPR, Dinas Pendapatan daerah, Dinas pariwisata
3	Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah	Memberikan dukungan kebijajakan pengelolaan Tahura	pengelola Tahura, Dinas Pendapatan daerah, BKSDA. Dinas PUPR, Dinas Pemberdayaan,
4	Dinas PUPR Sulawesi Tengah	Perbaikan akses transportasi menuju Wisata Alam Kapopo	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
5	Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Tengah	Mengelola hasil restribusi Wisata Alam Kapopo	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kehutanan, Pengelola Taman Hutan Raya
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Tengah	Melakukan pembinaan terhadap kelompok tani	Pengelola Taman Hutan Raya, Pemerintah Desa, Kelompok Tani
7	Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah	Melakukan koordinasi dan promosi Wisata Alam Kapopo	Dinas Kehutanan, Pengelola Tahura,
8	Balai Konservasi Sumberdaya Alam	Melakukan koordinasi dan pendampingan terkait flora dan fauna di kawasan Taman Hutan Raya	Dinas Kehutanan, Pengelola Tahura,
9	Pemerintah Desa Ngatabaru	Melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	Pengelola Taman Hutan Raya, Dinas Pemberdayaan masyarakat, Kelompok Tani, LSM Ngata Anata Makumpu,

No	*Stakeholder*	Peran	Pola Hubungan
			Perguruan Tinggi
10	LSM Ngata Anata Makumpu (NGATAKU)	Melakukan rehabilitasi dan pemulihan ekositem Wisata Alam Kapopo	Dinas Kehutanan, Pengelola Tahura, Pemerintah Desa, kelompok Tani
11	Kelompok Tani Hutan Ngatabaru	Mengelola usaha didalam kawasan Wisata Alam Kapopo	Pengelola Taman Hutan Raya, Dinas Pemberdayaan masyarakat, LSM Ngata Anata Makumpu, Perguruan Tinggi
12	Kelompok Tani Hutan Kawatuna	mengelola usaha didalam kawasan Wisata Alam Kapopo	Pengelola Taman Hutan Raya, Dinas Pemberdayaan masyarakat, LSM Ngata Anata Makumpu, Perguruan Tinggi
13	Perguruan Tinggi	Melakukan penelitian dan pengabdian pada kawasan Wisata Alam Kapopo	Pengelola Taman Hutan Raya, Dinas Pemberdayaan masyarakat, LSM Ngata Anata Makumpu, Perguruan Tinggi

Tingkat Pengaruh dan Kepentingan

Berdasarkan hasil analisis, terlihat adanya perbedaan tingkat pengaruh dan kepentingan dari masing-masing pihak terkait (*stakeholder*) dalam pengembangan wisata alam Kapopo. Dengan menggunakan *Stakeholder* grid yang terbagi dalam empat kuadran, kategori pada matriks (Gambar 1.) dapat mencerminkan tingkat pengaruh dan kepentingan yang dimiliki oleh setiap s*takeholder* dalam konteks pengembangan tersebut.

Key Player

Stakeholder yang masuk dalam kategori II (*Key Player*) merupakan pihak yang memiliki kepentingan dan penagaruh tinggi, *Stakeholder* ini terdiri dari Pengelola Taman Hutan Raya, Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah, Pemerintah Desa Ngatabaru dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ngata Anata Makumpu (NGATAKU). Pengelola Taman Hutan Raya memiliki peran sentral dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan wisata alam Kapopo (Ramhadani, 2020). Pengelola TAHURA memiliki kepentingan tinggi dalam menjaga keberlanjutan dan daya tarik wisata alam Kapopo. Pengaruh Pengelola TAHURA sangat signifikan karena memilki tanggungjawab langsung atas operasional dan pengembangan taman.

Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah juga memiliki tingkat kepentingan tinggi dalam pengelolaan Tahura, yang mencakup Wisata Alam Kapopo. Keberadaan Dinas Kehutanan Sulawesi Tengah memberikan dukungan kebijakan yang berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis yang mempengaruhi pengelolaan taman. Peran kebijakan mereka dapat berdampak langsung pada pengelolaan dan pelestarian alam (Maulana *et al*., 2020; Rafiuddin *et al*., 2023).

Subject

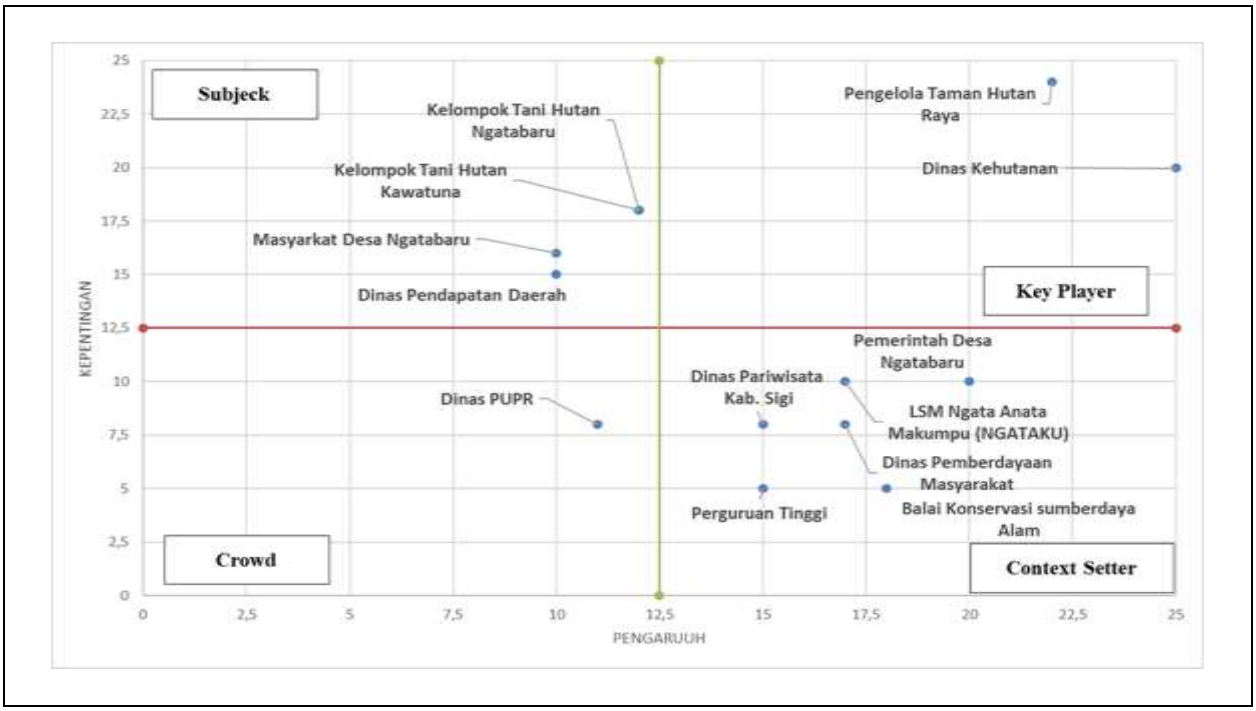
Terdapat empat s*takeholder* yang memiliki tingkat kepentingan tinggi sedangkan pengaruh rendah, *Stakeholder* terdiri dari dinas pendapatan daerah Sulawesi Tengah, pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, kelompok tani hutan Ngatabaru dan kelompok tani hutan kawatuna. *Stakeholder* tersebut memiliki nilai yang penting dalam pengelolaan Wisata Alam Kapopo, namun memilki pengaruh yang rendah dalam pengelolaan Wisata Alam Kapopo. Dinas pendapatan daerah Sulawesi Tengah memiliki kepentingan tinggi dalam pengelolaan retribusi, sementara pengaruhnya relatif rendah pada operasional wisata. Pemerintah

provinsi Sulawesi Tengah memiliki kepentingan tinggi dengan peran anggaran dan kebijakan, dan pengaruhnya lebih dominan dalam kebijakan dan dukungan finansial. Kelompok tani hutan Ngatabaru dan kelompok tani hutan Kawatuna memiliki kepentingan tinggi dalam usaha mereka di kawasan wisata alam Kapopo, meskipun pengaruh langsung mereka terbatas pada operasional wisata (Enmo, 2023; Sulistyadi *et al*., 2019).

Context Player

Beberapa *stakeholder* yang termasuk dalam kategori *context player* yakni Balai Konservasi Sumberdaya Alam, Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sulawesi Tengah, Perguruan Tinggi. Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA) memiliki peran utama dalam melakukan koordinasi dan pendampingan terkait flora dan fauna di kawasan Taman Hutan Raya, termasuk Wisata Alam Kapopo. BKSDA memiliki pengaruh yang kuat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem dan perlindungan spesies yang ada di taman. Namun, tingkat kepentingan mereka cenderung rendah karena fokus utama mereka adalah pada aspek konservasi alam dan lingkungan (Lugina *et al.*, 2017).

Dinas pariwisata Sulawesi Tengah memiliki peran penting dalam koordinasi dan promosi wisata alam Kapopo, yang mencakup upaya untuk meningkatkan daya tarik wisata. Meskipun pengaruh mereka dalam mengiklankan dan mempromosikan destinasi ini signifikan, kepentingan mereka dalam hal pengelolaan lingkungan mungkin tidak sekuat pihak lain, karena fokus utama mereka adalah pada aspek pariwisata dan promosi.



Gambar 1. Tingkat Pengaruh dan Kepentingan

Dinas pemberdayaan masyarakat Sulawesi Tengah dan perguruan tinggi memiliki peran dalam pembinaan dan penelitian di kawasan wisata alam Kapopo. Dinas pemberdayaan masyarakat mendukung kelompok tani, sementara perguruan tinggi

melakukan penelitian dan pengabdian (Talantan *et al*., 2022). Meskipun keduanya memiliki pengaruh yang mungkin kuat dalam hal pendidikan, penelitian, dan pembinaan masyarakat, tingkat kepentingan mereka dalam pengelolaan wisata alam Kapopo mungkin lebih rendah karena fokus utama mereka adalah pada pengembangan sumber daya manusia dan penelitian (Witno *et al*., 2020).

Pemerintah desa Ngatabaru dan LSM Ngata Anata Makumpu (NGATAKU) memiliki peran dalam pembinaan, pemberdayaan masyarakat, serta rehabilitasi dan pemulihan ekosistem Wisata Alam Kapopo. Kedua pihak ini memiliki kepentingan yang tinggi dalam menjaga keberlanjutan dan manfaat bagi masyarakat lokal. Meskipun pengaruh mereka mungkin tidak sekuat pengelola Taman Hutan Raya dan Dinas Kehutanan, peran mereka dalam pembinaan, pemberdayaan, serta rehabilitasi ekosistem memainkan peran kunci dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat (Diansari *et al*., 2019).

Crowd

Crowd merupakan *stakeholder* yang memilki tingkat pengaruh dan kepentingan rendah dalam pengelolaan wisata alam Kapopo. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan *stakeholder* yang berada pada tingkatan ini, keberadaan Dinas PUPR tidak berpengaruh

Pola hubungan *Stakeholder*

Menggali pola hubungan antar s*takeholder* menjadi esensial dalam memahami keterkaitan diantar pihak-pihak yang memainkan peran dan menghindari konflik dalam pengelolaan Wisata Alam Kapopo Taman Hutan Raya Provinsi Sulawesi Tengah. Hubungan antar s*takeholder* ini dapat dijelaskan dalam tabel yang mencantumkan kata kunci peluang kerjasama, saling mengisi dan potensi konflik (Wahyu *et al*., 2019). Pola hubungan juga menggambarkan bagaimana *Stakeholder* berkolaborasi, saling mendukung atau saling bertentangan dalam mencapai kepentingan masing-masing (Praestyo *et al*, 2017).

Kerjasama *stakeholder* dalam konteks pengelolaan sangat penting untuk keberlanjutan dan kesuksesan pengelolaan Wisata Alam Kapopo. Kerjasama yang positif dapat menciptakan sinergi diantara s*takeholder* (Hamka *et al*., 2023). Hubungan kerjasama antara s*takeholder* dalam pengelolaan Wisata Alam Kapopo terjalin dengan baik terlihat dibeberapa program pengelolaan Wisata Alam Kapopo yang melibatkan *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dalam program tersebut. Antara lain pada program pemberdayaan masyarakat, pihak pengelola Tahura selalu melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan masyarakat, Dinas Pariwista Kabupaten Sigi, dan LSM Anata Makumpu (NGATAKU) Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk secara efektif mengimplementasikan berbagai kegiatan pemberdayaan yang melibatkan partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak terkait (Maysarah *et al*., 2017). Dengan sinergi antara pihak pengelola Tahura, instansi pemerintah terkait, dan LSM, diharapkan program ini dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat setempat serta meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan lingkungan di sekitar kawasan Tahura (Talantan *et al*., 2022).

Pada program pelestarian alam disekitar wisata alam Kapopo pihak pengelola Tahura selalu berkordinasi dengan Balai Konservasi Sumberdaya Alam, LSM Ngata Anata Makumpu (NGATAKU) dan juga KTH untuk melakukan rahabilitasi dan pemulihan ekosistem dengan menggunakan pola agroforestry. Selain juga dalam pengembangan ekonomi masyarakat pihak pengelola Tahura melibatkan KTH Ngatabaru dan KTH Kawatuna melalui usaha kelompok

yang dilakukan dalam kawasan Wisata Alam Kapopo (Maria *et al*., 2020).

STAKEHOLDERS	Pengelola Taman Hutan Raya	Pemerintah Provisi Sulawesi Tengah	Dinas Kehutanan sulteng	Dinas PUPR Sulteng	Dinas Pendapatan Daerah Sulteng	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sulteng	Dinas Pariwisata Sulteng	Balai Konservasi sumberdaya Alam	Pemerintah Desa Ngatabaru	LSM Ngata Anata Makumpu (NGATAKU)	Kelompok Tani Hutan Ngatabaru	Kelompok Tani Hutan Kawatuna	Perguruan Tinggi
Pengelola Taman Hutan Raya		1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2,3	1,2,3	1,2
Pemerintah Provisi Sulawesi Tengah			1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Dinas Kehutanan sulteng				1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Dinas PUPR Sulteng					1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Dinas Pendapatan Daerah Sulteng						1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Sulteng							1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi								1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Balai Konservasi Sumberdaya Alam									1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Pemerintah Desa Ngatabaru										1,2	1,2	1,2	1,2
LSM Ngata Anata Makumpu (NGATAKU)											1,2	1,2	1,2
Kelompok Tani Hutan Ngatabaru												1,2	1,2
Kelompok Tani Hutan Kawatuna													1,2
Perguruan Tinggi													

Keterangan: 1=Kerjasama; 2= Hubungan Saling Mengisi, dan 3= Potensi konflik

Salah satu upaya untuk memecahkan permasalahan yang dapat memicu konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam khusus wisata alam adalah dengan membentuk hubungan saling mengisi antara *stakeholder*. Salah satu permasalahan yang hadapi oleh pengelola Wisata Alam Kapopo adalah perbedaan pandangan dengan kelompok tani hutan (KTH) dalam pengelolaan Wisata Alam Kapopo kelompok tani hutan kurang menerima kontribusi yang memadai dari pihak pengelola Wisata Alam Kapopo (Maria *et al*, 2020). Namun demikian permasalahan perbedaan pandangan ini dapat diselesaikan dengan memperkuat hubungan saling mengisi antara s*takeholder*.

Potensi konflik pengelolaan Wisata Alam Kapopo dan KTH Ngatabaru dan KTH Kawatuna adalah perbedaan pandangan dalam mengelola Wisata Alam Kapopo. KTH merasa kurang menerima kontribusi dikarenakan akses masyarakat dalam pengelolaan Wisata Alam Kapopo sangat terbatas. Hal ini dapat jika tidak diselesaikan akan memicu konflik dalam yang berkepanjangan yang mengakibatkan terhambatnya pengembangan pengelolaan Wisata Alam Kapopo. Permasalahan perbedaan pandangan yang dapat berpotensi konflik dalam pengelolaan wisata alam di kawasan konservasi, dapat diselesaikan dengan melaksanakan program yang dapat di kolaborasikan untuk memenuhi kepentingan dari setiap *stakholder* (Maiwa *et al*., 2018).

KESIMPULAN

Dalam Pengelolaan Wisata Alam Kapopo teridentifikasi 13 *Stakeholder* yang memiliki peran yang beragam mulai dari pengelolaan hutan, pemberdayaan masyarakat, hingga promosi pariwisata. *Stakeholder* yang teridentifikasi terdiri dari unsur pemerintahan, perguruan tinggi, dan masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut.

Pola hubungan antar *Stakeholder* menunjukkan kerjasama yang baik, terutama dalam program pemberdayaan masyarakat dan pelestarian alam. Namun, adanya perbedaan pandangan antara pengelola wisata dan kelompok tani hutan menunjukkan potensi konflik yang perlu dikelola dengan baik. Adanya kerjasama positif dan pola hubungan yang baik antar s*takeholder* diharapkan dapat menciptakan sinergi untuk mendukung keberlanjutan dan kesuksesan pengelolaan Wisata Alam Kapopo di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Diansari, D., Sriati, & Lionardo, A. 2019. Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 3 Tahun 2012 Tentang Kolaborasi Pengelolaan Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. *Demography Journal of Sriwijaya (DeJoS)*. Vol. 2. No. 2, 40–50.

Enmo, J. 2023. Analisis Stakeholder Dalam Implementasi Kebijakan Kemitraan Konservasi Di Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman. *Skripsi*. Universitas Lampung.

Flamin, A., dan Asnaryati. 2013. Potensi Ekowisata dan Strategi Pengembangan Tahura Nipa-Nipa, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea*. Vol. 2. No. 2, 154–168.

Hamka, H., Maiwa, A., Hapid, A., Muthmainnah, M., dan Pribadi, H. 2023. Pembinaan Kelompok Tani Sintuvu Roso dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*. Vol. 5. No. 2, 164-171.

Intyaswono, S., Yulianto, E., dan Mawardi, M. K. 2016. Peran Strategi City Branding Kota Batu dalam Trend Peningkatan Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Studi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 30. No. 1, 65–73.

Kadir, W. Abd., Awang, S. A., Hadi Purwanto, R. H., dan Poedjirahajoe, E. 2013. Analisis Stakbholder Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraungo Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*. Vol. 20. No. l, 11–21.

Lebu, C. F., Mandey, S. L., & Wenas, R. S. 2019. Pengaruh Lokasi, Persepsi Harga Dan Daya Tarik Wisata Terhadap Keputusan Berkunjung Wisatawan Di Objek Wisata Danau Linow. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. Vol. 7. No. 4, 5505-5514.

Lugina, M., Alviya, L., Indartik., dan Pribadi, M. A. 2017. Strategi Keberlanjutan

Pengelolaan Hutan Mangrove Di Tahura Ngurah Rai Bali. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol. 14. No.1, 61-77.

Maiwa, A., Umar, S., Golar, dan Rahman, A. 2018. Resolusi konflik dalam pengelolaan Taman Nasional Lore Lindu. *Jurnal Warta Rimba*. Vol. 6. No. 2, 47-54.

Maria, Golar, dan Massiri, S. Dg. 2020. Kolaborasi Stakeholder Dalam Penyelesaian Konflik di Tahura Sulawesi Tengah. *Mitra Sains*. Vol. 8. No. 2, 199–214.

Maulana, M. A., Ramadan, Wf., dan Warlina, L. 2020. Kesiapan Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir H. Juanda terhadap Penerapan Kebijakan New Normal. *Jurnal Wilayah Dan Kota*. Vol. 7. No. 2, 45–53.

Primadany, S. R., Mardiyono dan Riyanto. 2013. Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol. 1. No. 4, 135–143.

Rafiuddin., Rauf, A., dan Hadu, S. 2023. Studi Kebijakan Taman Hutan Raya (Tahura) Palu Sulawesi Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*. Vol. 6. No. 1, 1–9.

Ramadhany, L. 2020. Arahan Pengembangan Wisata Alam Taman Hutan Raya Kapopo Ngatabaru di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *Doctoral Dissertation*. Universitas Tadulako.

Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Stringer, L. C. 2009. Who's In and Why? A Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management. *Journal of Environmental Management*. Vol. 90. No. 5, 1933–1949.

Simamora, R. K., dan Sinaga, R. S. 2016. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di KabupatenTapanuli Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Vol. 4. No. 1, 79–96.

Talantan, N. T. N., Basri, I. S. B. I. S., Winarta, A. W. A., dan Arifin, R. A. R. 2022. Strategi Manajemen Pengembangan Taman Hutan Raya Kapopo Sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik Kabupaten Sigi. *Jurnal PeWeKa Tadulako*. Vol. 1. No. 1, 34-42.

Wahyu., Golar., dan Massiri, S. Dg. 2019. Analisis Kepentingan Stakeholder Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Hutan Desa Namo Kecamatan Kulawi. *Jurnal Forest Sains*. Vol. 16. No. 2, 105–116.

Witno, Maria, dan Supandi, D. 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Tandung Billa Di Kelurahan Battang Kota Palopo. *Jurnal Penelitian Kehutanan Bonita*. Vol. 2. No. 2, 35–42.